

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisis, mulai dari level teks, level konteks, hingga menemukan frame besar SKH Media Indonesia, peneliti menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah di Bab I, antara lain:

1. Dipo Alam diprofilkan sebagai sosok yang arogan, alergi kritik, dan memiliki kekurangdewasaan politik. Ia tidak bisa menerima kritik dari media kritis yang ditujukan untuk SBY dan pemerintahannya. Ia juga tidak mau mengakui telah memboikot ketiga media kritis, Metro TV, TVOne, dan Media Indonesia, serta menolak meminta maaf. Perbuatannya dinilai telah menjatuhkan integritas Presiden dan menjadi kerikil dalam pemerintahan SBY.
2. Dalam pemberitaannya, Media Indonesia menganggap Dipo Alam bersalah dengan mengeluarkan instruksi boikot karena berupaya mengekang kebebasan pers. Hal tersebut dikarenakan berlawanan dengan UUD 1945. Selain itu, Dipo Alam tidak berhak mengeluarkan instruksi boikot, karena bukan kewenangannya sebagai Sekretaris Kabinet.
3. Dipo Alam diprofilkan sebagai seorang pembela Presiden. Pemboikotan yang ia lakukan semata-mata karena ia ingin membela Presiden dan pemerintahannya yang selalu dijelek-jelekkan oleh media kritis nasional, salah satunya Media Indonesia.

4. Media Indonesia, sebagai salah satu media yang diboikot oleh Dipo Alam, tetap berusaha bersikap obyektif dalam memberitakan kasus ini. Menurut hasil wawancara dengan wartawan dan redaktur Media Indonesia, cara menjaga keobyektifitasannya yaitu dengan mengedepankan sistem *both sides* serta *check and recheck*, bahkan jika perlu *triple check*. Dalam kasus ini, Media Indonesia tetap mewawancarai Dipo Alam dan tetap memuat pernyataannya tentang pemboikotan yang ia lakukan.

#### B. SARAN

Dalam proses penelitian yang panjang ini, peneliti sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat. Dari awal hingga akhir proses penelitian ini ada banyak kendala, salah satunya dari pihak media yang diteliti, Media Indonesia. Misalnya, kesulitan akses wawancara, seperti ketidakbersediaan wawancara melalui email. Kemudian sempat juga terjadi kesalahpahaman antara pihak Media Indonesia dan peneliti mengenai surat ijin dari Kampus FISIP Atma Jaya Yogyakarta, namun semua masalah sudah teratasi sehingga selesailah penelitian ini.

Maka dari itu diharapkan peneliti lainnya dapat menjalin komunikasi dengan pihak yang diteliti dengan baik sehingga dapat menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Selain itu peneliti mendapatkan informasi yang mendalam, yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini Abar. 1995. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*.  
Jakarta: Granit.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Oliver, Sandra. 2001. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

## JURNAL

- Sceufele, Dietram A. 1999. *Framing as Theory of Media Effect dalam Journal of Communication*. Madison: Inform Global.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua. 1988. Jakarta: Balai Pustaka.
- Company Profile SKH Media Indonesia dalam bentuk fotokopi.*

## WEBSITE

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada Jumat, 6 Juli 2012.  
18.27 WIB.

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/22/205220/284/1/Dipo-Alam-Terindikasi-Melanggar-Prinsip-Pers-Profesional>. Diakses pada Senin, 3  
September 2012 pukul 12.40 WIB

<http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/09/159106/-Partai-NasDem-Gelar-Halal-Bihalal-dengan-Masyarakat/1>. Diakses pada tanggal  
1 Oktober 2012.

## SURAT KABAR

Surat Kabar Harian Media Indonesia. *Pemerintah Bokot Iklan Media Kritis*.  
Selasa, 22 Februari 2011.

Surat Kabar Harian Media Indonesia. *Bantah Boikot Enggan Minta Maaf*. Rabu,  
23 Februari 2011.

Surat Kabar Harian Media Indonesia. *Metro TV dan Media Indonesia Somasi Dipo Alam*. Rabu, 24 Februari 2011.

Surat Kabar Harian Media Indonesia. *Dipo Dilaporkan ke Polisi*. Minggu, 27 Februari  
2011.

## SKRIPSI

Puspitasari, Felicia Ratih. 2010. *Profiling Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra Wati dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia. Analisis Framing*

*Pencitraan Menteri keuangan Sri Mulyani dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia edisi 1 desember 2009-24 Februari 2010 Terkait Dengan Kasus bank Century.* UAJY. Skripsi.

Arifin, Pupung. 2008. *Profiling Nurdin Halid dalam editorial di Tabloid Olahraga Bola. Analisis Framing Pencitraan Nurdin Halid dalam Ulasan Rubrik “Catatan Ringan” dan “Usul Usil” di Tabloid Olahraga Bola terkait Kasus Pidana Ketua Umum PSSI.* UAJY. Skripsi.

Budiharjo, Gunandi. 2010. *Pencitraan Ruhut Sitompul dalam Pemberitaan Sidang Pansus Skandal Bank Century oleh Detik.com pada Tanggal 6 dan 7 Januari 2010. Studi Analisis Wacana Pemberitaan Situs Detik.com dalam Konten DetikNews.* UAJY. Skripsi.

Siregar, Monalisa Pertiwi. 2010. *Profiling Surya Paloh dalam SKH Media Indonesia. Analisa Framing Profiling Surya Paloh dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia Terkait dengan Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar ke VIII.* UAJY. Skripsi.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### Wawancara I

Narasumber : Irvan Sihombing

Jabatan : wartawan Media Indonesia

Tanggal Wawancara : 24 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012

Peneliti	<b>Apakah Anda pernah mendapat pendidikan jurnalistik, baik sebelum maupun ketika bekerja di Media Indonesia (MI)? (Kuliah, training, dll)</b>
Irvan	Saya kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Selama kuliah, saya pernah mengikuti pendidikan jurnalistik tentunya baik secara formal maupun training-training yang diselenggarakan himpunan mahasiswa jurusan (HMJ). Selain itu, saya juga pernah mengambil Kuliah Kerja Komunikasi sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di Radio Trijaya FM Jakarta dan TVRI Jakarta. Setelah lulus, saya pernah mengikuti training di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Baca sejarahnya: Sidang pleno ke-29 Dewan Pers di Denpasar, Bali, pada 17-19 Juli 1987 mengambil keputusan yang sangat signifikan. Sidang menekankan perlunya mendirikan pusat pendidikan pers. Untuk merealisasikan hal itu Dewan Pers menugasi Jakob Oetama, Dja'far H. Assegaff, dan Zulharmans. Ketiganya bersama anggota Dewan Pers yang lain lalu membentuk Yayasan Pers Dr. Soetomo pada 5 Februari 1988. ( <a href="http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1&amp;Itemid=3">http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1&amp;Itemid=3</a> )
Peneliti	<b>Bagaimana aturan-aturan yang diterapkan oleh MI untuk para wartawannya ketika memproduksi berita? Apakah visi dan misi MI masih digunakan (obyektif, lugas, dan seimbang).</b>
Irvan	Terkait aturan, setiap wartawan diminta untuk mengedepankan semangat cover both sides serta check and recheck bahkan kalau perlu triple-check.
Peneliti	<b>Menurut Mas Irvan pribadi, bagaimana Anda memandang kasus Dipo Alam terkait dengan pemboikotan media kritis di Indonesia?</b>
Irvan	Sebagai seorang pribadi terlepas pekerjaan saya sebagai wartawan, Dipo Alam yang merupakan pejabat publik tidak seharusnya melakukan boikot terhadap media kritis di Indonesia. Kenapa?

	Karena, media apalagi yang sudah dianggap sebagai media kritis merupakan pilar keempat demokrasi. Sesuatu yang harus ada di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.
Peneliti	<b>Menurut Anda, bagaimana pemberitaan mengenai kasus tersebut oleh MI, yg notabene merupakan salah satu pihak yang akan diboikot?</b>
Irvan	<p>Pertanyaan ini saya jawab sebagai seorang wartawan. Terlebih dahulu saya luruskan pertanyaannya. Bahwa Media Indonesia sudah diboikot bukan akan. Kenapa saya mengatakan sudah? Karena dia memang sudah mengucapkan boikot itu dalam salah satu rapat. "Majelis berpendapat benar tergugat telah melakukan boikot ke media untuk tidak melayani wawancara pada prime time serta tidak memasang iklan di media yang menjelek-jelekkkan pemerintah," ucap Suwidya.</p> <p>Baca: <a href="mailto:mail.mediaindonesia.com/src/webmail.php">mail.mediaindonesia.com/src/webmail.php</a></p> <p>Dalam memberitakan kasus boikot ini, kami pertama-tama adalah mengkonfirmasi. Awalnya, Media Indonesia mendengar bahwa yang bersangkutan mengeluarkan perintah boikot dalam suatu rapat dengan sekretariat jendral kementerian. Namun, kami belum bisa memastikan kapan rapat itu berlangsung. Belakangan setelah sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bergulir, rapat itu adalah rapat tertutup antara Sekretaris Kabinet dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian beserta humasnya pada Senin, 7 Februari 2011. Baca:</p> <p><a href="http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/09/20/lrtmmn-saksi-dipo-alam-sebut-dua-media-tapi-tak-ada-seruan-boikot">http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/09/20/lrtmmn-saksi-dipo-alam-sebut-dua-media-tapi-tak-ada-seruan-boikot</a></p> <p>Oleh koordinator liputan, saya yang saat itu merupakan wartawan Istana ditugaskan untuk mengkonfirmasi kepada Dipo Alam. Apakah benar informasi yang kami terima tersebut. Saya bertanya langsung kepada Dipo Alam dalam se usai rapat kabinet dengan BUMN di Istana Bogor pada 21 Februari 2011. Sebelum mewawancari Dipo Alam, saya terlebih dahulu memperkenalkan identitas saya. Saat saya melakukan wawancara, saya bahkan sempat diperkenalkan oleh juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dan ada beberapa wartawan Istana yang ikut melihatnya wawancara Dipo Alam. Dia (Dipo Alam) lalu membenarkan telah mengeluarkan perintah boikot.</p>
Peneliti	<b>Dalam kasus ini, MI dan Metro TV disebutkan sebagai media yang akan diboikot, bagaimana MI menjaga obyektivitasnya?</b>
Irvan	Metro TV (juga Media Indonesia) dan TV One baru disebut satu hari kemudian oleh Dipo Alam masih di tempat yang sama. Karena, rapat

	<p>kabinet dengan BUMN di Istana Bogor tidak hanya berlangsung satu hari. Ketika itu, Dipo Alam menyebutkan secara spesifik nama-nama media yang diboikot setelah diwawancara oleh televisi, cetak, radio dan online. Sebab, ketika saya mewawancarai Dipo Alam di hari pertama, isu yang saya tanyakan mungkin tidak terlalu seksi jadi tidak banyak teman-teman yang mengikuti saya. Baru lah ketika koran Media Indonesia dan beberapa Koran lainnya menerbitkan berita tersebut, isu ini meledak sehingga semua peliput Istana ikut menurunkan berita tersebut.</p> <p>Bagaimana MI menjaga obyektivitasnya? Dengan tetap member ruang kepada Dipo Alam untuk hak jawab. Selain itu, Media Indonesia tetap mewawancarai Dipo Alam sebagai sekretaris kabinet terkait pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan tugas dan tanggung jawab beliau.</p>
Peneliti	<b>Bagaimana MI menyosokkan Dipo Alam dalam setiap pemberitaannya, terkait kasus ini?</b>
Irvan	Dipo Alam adalah pejabat negara yang mengeluarkan pernyataan boikot.
Peneliti	<b>Bagaimana frame yang ingin dibentuk oleh MI dalam kasus ini?</b>
Irvan	Bahwa kebebasan pers itu sesuatu yang tidak boleh direnggut.
Peneliti	<b>Dalam artikel berjudul "Presiden Harus Copot Dipo Alam", siapa dan mengapa memilih judul tersebut?</b>
Irvan	Saya yang membuat judul itu. Kenapa memilih judul tersebut? Salah satu ciri-ciri judul adalah menarik namun tetap taat asas. Selain itu, ini merupakan intisari dari wawancara saya dengan pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana.
Peneliti	<b>Apakah Mas Irvan pribadi juga setuju pencopotan jabatan Seskab dari Dipo Alam? Bagaimana seharusnya Presiden menanggapi kasus ini?</b>
Irvan	Saya sebagai pribadi, bukan sebagai wartawan Media Indonesia, tidak terlalu merisaukan apakah Presidenharusnya mencopot Seskab Dipo Alam. Namun, saya sebagai pribadi hanya bisa prihatin karena ternyata pembantu presiden adalah orang yang tidak peduli dengan kebebasan pers sampai harus menginstruksikan boikot media kritis.Presiden menanggapi kasus ini, dari kacamata saya pribadi, seharusnya tidak tinggal diam. Harus diselidiki apakah benar Seskab Dipo Alam telah mengucapkan itu. Karena jangan lupa, Pers itu punya undang-undang tersendiri. Mengganggu kebebasan pers, sama saja melanggar undang-undang. Tapi, saya pribadi tidak tahu apakah ini murni instruksi Dipo Alam selaku seskab? Atau jangan-jangan



	memang Presiden sendiri yang memerintahkan Dipo Alam selaku seskab untuk mengeluarkan boikot tersebut. Hanya Tuhan yang tahu.
Peneliti	<b>Apakah dalam artikel tersebut ada penambahan atau pengurangan dari berita asli yang Anda tulis sebelum dan sesudah masuk Redaksi? Jika ya, mengapa hal tersebut terjadi?</b>
Irvan	<p>Saya tidak terlalu ingat apakah ada pengurangan dari berita asli atau tidak. Karena ketika saya mengetik saya menggunakan komputer umum, bukan di kantor. Tapi, saya pikir tulisan saya tidak terlalu banyak dipoles. Selain itu, kalau Anda melihat ada kode (Alw) itu artinya tulisan saya sudah digabungkan dengan reporter lain. Namun, reporter dengan kode Alw itu hanya menambahi beberapa bagian tidak semua.</p> <p>Masih terkait dengan pertanyaan Anda kenapa berita bisa ada pengurangan atau penambahan? Itu namanya editing. Editing dilakukan bisa karena banyak faktor. Bisa karena tulisan sang reporter ada yang kurang bagus, salah ketik, tidak sesuai frame. Tapi, saya seingat saya, tulisan asli saya tidak terlalu banyak diedit, kecuali dengan penggabungan dari berita hasil wawancara reporter lain.</p>
Peneliti	<b>Mengapa memilih Tjipta Lesmana, Arie Soejito, dan Zulkifli Hasan sebagai narasumber dalam artikel ini? Siapa yang memilih mereka? Bagaimana pemilihan narasumbernya?</b>
Irvan	Tjipta Lesmana merupakan pakar komunikasi politik. Dalam memilih narasumber, kita tentu harus menggunakan tingkatan. Pakar komunikasi politik saya pikir udah bisa dipilih untuk menanyakan fenomena boikot yang dikeluarkan Dipo Alam. Sebenarnya saya juga mewawancarai Effendi Gazali, tapi sepertinya ketik itu yang bersangkutan tidak bisa dihubungi atau ditemui. Arie Soejito dipilih karena beliau merupakan sosiolog dari salah satu kampus ternama Universitas Gajah Mada. Kemudian sudah sering digunakan pendapatnya oleh sejumlah media massa. Zulkifli Hasan itu bukan saya yang mewawancarainya. Sepertinya, redaktur yang menugasi salah seorang reporter.
Peneliti	<b>Bagaimana Mas Irvan menyeleksi hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut, yang akan dimuat dalam artikel?</b>
Irvan	Saya menulis apa yang saya tanyakan.
Peneliti	<b>Bagaimana citra Dipo Alam di mata mas Irvan dan MI sebelum dan sesudah kasus ini?</b>
Irvan	Di mata saya sebagai wartawan Media Indonesia, citra Dipo Alam

	<p>sebelum kasus ini adalah sosok pembela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia bahkan tidak sungkan-sungkan mengkritik balik tokoh-tokoh lintas agama yang menilai Indonesia menuju 'negara gagal' sebagai orang-orang yang terjangkit wabah mata kalong. Sesudah kasus ini, saya tidak terlalu memikirkan Dipo Alam. Mungkin masih sama seperti dahulu. Karena saya tidak terlalu lama di Istana hanya sekitar 5 bulan. Setelah di Istana saya menjadi reporter investigasi selama kurang lebih 4 bulan. Saya lalu ditugaskan meliput ekspedisi Europe-Asia selama kurang lebih 3 bulan. Ekspedisi lintas benua melewati sekitar 15 negara dari Malaysia hingga Italia menggunakan mobil buatan Indonesia. Setelah pulang dari sana, saya ditugaskan menjadi editor muda olahraga. Dari sisi Media Indonesia sebagai institusi, harus Anda tanyakan kepada Pemimpin Redaksi Media Indonesia.</p>
Peneliti	<p><b>Menurut Anda, mengapa Dipo Alam bisa sampai mengeluarkan pernyataan boikot? Apakah keluarnya pernyataan tersebut merupakan alasan pribadi atau memiliki hubungan dengan SBY dan pemerintahannya?</b></p>
Irvan	<p>Saya tidak tahu alasan persis kenapa Dipo Alam bisa sampai mengeluarkan pernyataan boikot. Tapi, dari hasil wawancara saya dengan Dipo Alam, itu dilakukan karena memasang iklan di media kritis itu merugikan pemerintah. Sudah dipasang iklan, tapi tetap dikritisi. Dipo Alam menganggap dirinya selaku seskab berhak mengeluarkan itu karena uang pemasangan iklan tersebut merupakan uang pemerintah. Untuk pastinya, Anda harus tanyakan itu kepada Dipo Alam langsung.</p>
Peneliti	<p><b>Dengan keluarnya pernyataan boikot media dari salah satu anggota pemerintah (Seskab), bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintahan SBY itu sendiri.</b></p>
Irvan	<p>Anda harus tanyakan kepada Presiden SBY pertanyaan ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemerintahan beliau. Tapi, saya sebagai wartawan menilai pernyataan Dipo Alam tidak pantas sekaligus membuktikan pemerintahan SBY memang tidak peka terhadap kebebasan pers.</p>
Peneliti	<p><b>Apakah pernah terjadi benturan antara Mas Irvan dengan pihak MI selama Anda bekerja sebagai wartawan MI?</b></p>
Irvan	<p>Saya kok agak risih dnegan istilah benturan yah? Terkesan konotatif krn benturan dpt mengakibatkan lebam, cedera, dll. Kalau saya sebagai wartawan Media Indonesia saya tetap harus</p>

	<p>sejalan dengan ideologi tempat saya bekerja. Kalau tidak sejalan dengan Media Indonesia saya sudah pindah. Tapi kalau yang dimaksud adalah perbedaan pendapat dengan siding redaksi tentu saja pernah. Seperti ketidak sepahaman dalam memandang suatu isu? Kalau seperti itu tentu saja pernah. Ada kalanya saya melihat sebaiknya berita ini dinaikkan tapi ternyata tidak atau seharusnya angle ini yang ditonjolkan tapi ternyata diganti.</p>
Peneliti	<p><b>Kemudian bagaimana Mas Irvan menghadapi benturan tersebut?</b></p>
Irvan	<p>Sekali lagi saya tidak terlalu sependapat dengan istilah benturan. Tapi kalau menggunakan istilah perbedaan pendapat, saya bias menjawabnya dari berbagai sisi. Ketika saya sebagai reporter kemudian siding redaksi (hasil keputusan pemred, redaktur, dan jajaran penentu kebijakan lainnya) meminta saya mengerjakan suatu isu tapi menurut saya isu itu tidak terlalu memiliki nilai berita hal pertama yang saya lakukan tentu mengajukan argumentasi. Walaupun argumentasi itu tidak diterima siding redaksi, saya kemudian punya pilihan. Tetap mengerjakan (meliput dan menulis) berita sesuai arahan kantor, mengerjakan (meliput dan menulis) berita sesuai pemikiran saya, atau tidak mengerjakan sama sekali. Tapi pilihan terakhir amat kecil untuk saya lakukan.</p> <p>Ketika saya sebagai asisten redaktur, sesuai jabatan saat ini, biasanya pilihan untuk menolak hasil siding rapat sulit dilakukan. Tentunya saya sudah harus menyodorkan sejumlah argumentasi kalau perlu bukti untuk menguatkan argumentasi tersebut. Dengan harapan, siding redaksi mau berubah pikiran dan keputusan. Kalau ternyata siding redaksi sudah ada keputusannya, saya harus menjalankannya. Kemudian saya memberikan arahan kepada reporter di lapangan sesuai dengan hasil siding redaksi tersebut.</p>
Peneliti	<p><b>Menurut mas Irvan, bagaimana pemberitaan-pemberitaa yang dimuat oleh MI? Apakah sudah byektif dan berimbang?</b></p>
Irvan	<p>Saya sebagai wartawan tentu harus mengedepankan prinsip obyektif dan berimbang. Semangat ini harus terus dikedepankan. Jika saya sebagai wartawan memliki pemikiran seerti itu, tentu tidak terlepas dari Media Indonesia sebagai habitat saya.</p> <p>Namun, tidak menutup kemungkinan ketidakobjektifan dan ketidakberimbangan itu terjadi baik oleh saya sebagai wartawan atau Media Indonesia sebagai institusi. Berita yang ditampilkan Media Indonesia bias jadi tidak berimbang atau tidak objektif karena memang itulah berita yang dikirimkan sang reporter, sesuai dengan</p>

	<p>framenya (subjektifitas) di lapangan, atau bias juga karena hasil keputusan rapat (siding redaksi).</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menjawab pertanyaan Anda, saya katakan ada kalanya berita Media Indonesia tidak berimbang atau tidak objektif. Tapi, sejauh ini, Media Indonesia memiliki semangat untuk mengedepankan prinsip dan semangat cover bothside, objektif, kritis, namun berimbang.</p>
--	---

## Wawancara II

Narasumber : Henri Siagian

Jabatan : redaktur Media Indonesia

Tanggal Wawancara : 25 Juli 2012

Peneliti	<b>Bagaimana proses produksi berita di Media Indonesia (MI)?</b>
Henri	Proses getting (pencarian) berita, dilanjutkan editing, proses, dan pencetakan. Dari hasil penggalan informasi wartawan di lapangan ditindaklanjuti oleh editor yang melakukan rapat serta diskusi yang intensif terhadap capaian wartawan, untuk kemudian diedit. Selanjutnya, masuk proses produksi, yaitu memasukkan hasil editor ke halaman untuk kemudian dikirim ke proses pencetakan.
Peneliti	<b>Bagaimana kebijakan redaksional di MI?</b>
Henri	Kebijakan redaksional MI atas suatu berita adalah hasil pembahasan dan diskursus yang intensif antara reporter-editor, sesama editor, dan editor-unsur asisten kepala divisi, kepala divisi pemberitaan, atau dengan direktur pemberitaan.
Peneliti	<b>Bagaimana keterlibatan pemilik MI dalam proses pembuatan berita, mulai dari penentuan topik berita sampai berita yang sudah diterbitkan? (Topik, narasumber, editing, dll)</b>
Henri	Pemilik tidak terlibat dalam hal ini di ranah ruang redaksi.
Peneliti	<b>Bagaimana anda/redaksional memilih narasumber yang tepat untuk berita-berita yang akan dimuat di MI terkait dengan kasus Dipo Alam ini? Adakah pertimbangan tertentu?</b>
Henri	Penentuan narasumber berdasarkan kedekatan dengan persoalan dan memahami kejadian yang ada (MI mengonfirmasi ke sejumlah unsur pemerintah), kepakaran seseorang (orang yang mengerti prinsip keuangan negara, administrasi negara, hukum tata negara).
Peneliti	<b>Bagaimana MI memandang Dipo Alam sebagai pihak yang</b>

	<b>berupaya melakukan pemboikotan media? (MI sebagai salah satu media yang diboikot)</b>
Henri	Pengadilan juga mengakui Dipo Alam telah menyalahi kewenangan dengan menyerukan boikot. Apalagi karena Dipo Alam keberatan dengan pemberitaan terhadap Presiden.
Peneliti	<b>Bagaimana MI memposisikan diri dalam setiap pemberitaan mengenai Dipo Alam terkait kasus pemboikotan media yang ia lontarkan?</b>
Henri	Jadi, ada dua persoalan yang disorot MI, 1. Kewenangan Dipo Alam selaku Seskab yang tidak ada berurusan dengan media massa, 2. Seruan boikot adalah pengingkaran terhadap era keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Apalagi MI tidak menyalahi aturan jurnalistik, karena pemberitaan selalu menyertakan konfirmasi dan konfrontasi.
Peneliti	<b>Apakah MI masih menjaga visinya, yaitu obyektif, lugas, dan seimbang dalam pemberitaan ini?</b>
Henri	Iya. MI tetap memuat pernyataan Dipo Alam yang sesumbar mengakui melontarkan seruan boikot di berbagai tempat.

## Di Mata Din, Dipo Terlalu Arogan

KETUA Umum PP Muhammadiyah menilai pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang tokoh agama yang disebutnya seperti gagak hitam berbulu putih merupakan upaya pengalihan substansi masalah. Menurutnya, sikap semacam itu menunjukkan kekeerdilan politik. Dia meminta Presiden berkonsentrasi terhadap tugasnya, ketimbang mengalihkan isu. Presiden sebagai komandan dalam pemerintahannya, menurut Din, bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

"Dia bagaikan menepuk air didulang, tepercik ke muka sendiri. Menuduh orang congkak, tetapi justru dirinya membuktikan kecongkakan itu," paparnya, akhir pekan lalu.

Jika tak terima dengan berbagai kritikan terhadap kinerja pemerintah, sambungnya, Dipo seharusnya mendorong Presiden untuk fokus pada berbagai masalah yang selama ini menjadi sorotan tajam masyarakat.

"Berbagai masalah ini harus diselesaikan, sedangkan kita menyaksikan pemerintah seperti lari dari masalah. Kepemimpinan seperti ini hanya kerja keras menjaga citra," tandasnya.

Saat dihubungi di kesempatan terpisah, pengajar psikologi politik Universitas Indonesia Dicky Pelupessy menyebut instruksi Dipo itu menjadi bukti adanya keresahan kolektif pemerintahan Susilo Bambang



**REAKSI ATAS PERNYATAAN DIPO:** Sejumlah wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas di kabupaten/kota di Aceh berteriak mengancam Sekretaris Kabinet Dipo Alam atas pernyataan boikot media kritis, di halaman Kantor DPP Persatuan Wartawan Aceh di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Sabtu (26/2).

Yudhoyono terhadap berbagai serangan ketidakpuasan dari publik.

"Ada suasana kebatinan yang sama di pemerintah dan orang-orang yang menopang peme-

rintah termasuk Dipo terhadap pemooakan yang ditujukan ke pemerintah. Keresahan kolektif ini sudah memuncak dan akhirnya mendorong Dipo mengeluarkan pernyataan tersebut,"

tutur Dicky.

"Ingat, pernyataan Dipo tak bisa dianggap sebagai pribadi. Ia punya jabatan politik, yakni sekretaris kabinet dan jelas itu bukan alasan pribadi."

Motivasi politik itu, menurut Dicky, sangat kental terbaca. Bukan dalam artian disuruh oleh siapa, tapi ada kemauan yang sama yang dirasakan pemerintah. (NA/VB/P-2)

## Bantah Boikot Enggan Minta Maaf

SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam membantah memboikot iklan media massa yang kerap mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, mantan aktivis 1978 ini enggan minta maaf dan siap melayani somasi tiga media yang disebutnya, yakni *Metro TV*, *TV One*, dan *Media Indonesia*.

Bantahan Dipo itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan UKP4 dan Seskab di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. "Saya tidak boikot. Saya hanya mengimbau dana itu lebih baik untuk meningkatkan mutu humas daripada memasang iklan di tiga media," kata Dipo.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam di sela-sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2), mengaku mengeluarkan instruksi boikot iklan kepada media kritis. "Saya memberikan instruksi boikot kepada seluruh sekjen dan humas kementerian. Kita bukan alergi kritik," ujarnya, seraya menambahkan dia juga memerintahkan kepada seluruh staf khusus presiden untuk tidak meladeni permintaan wawancara karena hanya membuat laris televisi

tersebut (*Media Indonesia*, 22/2).

Kendati membantah memboikot iklan, Dipo menolak mencabut pernyataannya yang kontroversial itu. "Mengapa saya meng-counter karena banyak menteri yang tidak mau membela presiden atau pemerintah dengan menggunakan hak koreksi. Saya tidak menyesal. Saya tidak akan minta maaf. Kalau mau disomasi, saya siap," tandasnya.

Pada rapat tersebut, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu juga tak bisa menyembunyikan kegeraman. "Apa Pak Dipo Alam sedang mendari-

cari muka Pak Presiden. Ini jadi peringatan terhadap semua pejabat negara yang bicara ngawur," katanya.

Secara terpisah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Dipo melampaui kewenangan sebagai Seskab. "Sebagai Seskab, Pak Dipo tidak punya kewenangan untuk ambil tindakan ke aparat pemerintah lain. Karena (hanya) sekretaris kabinet."

Rencananya, hari ini Dewan Pers akan mengundang mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI itu untuk diminta klarifikasi. (Din/\* /X-6)

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com) atau [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

# Presiden Harus Copot Dipo Alam

Pembantu Presiden yang selalu mencari muka merupakan kerikil dalam kabinet. Kalau memang sudah mengganggu, segera dibuang.

IRVAN SIHOMBING

**P**RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mencopot Sekretaris Kabinet Dipo Alam dari jabatannya. Dipo dinilai telah bertindak *overacting* dengan mengeluarkan instruksi memboikot media massa sehingga merusak integritas Presiden. Jika tidak dipecah, Dipo akan terus menjadi kerikil bagi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Demikian penegasan pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam perbincangan kemarin. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang selalu memerangi media massa tinggal menunggu waktu kejatuhannya. "Kalau menginstruksikan boikot media massa, habis

pemerintah SBY," kata Tjipta.

Namun, dosen komunikasi Universitas Pajajaran itu berani bertaruh SBY tidak pernah berpikir untuk memboikot media. Ulah Dipo jelas merupakan sikap berlebihan dari seseorang yang ingin membela atasannya mati-matian. Sikap tersebut secara tidak langsung menjatuhkan integritas atasannya. "Dipo mungkin hanyalah masalah kecil, tetapi pemimpin di mana pun sering kali terdandung masalah kecil. Karena itu, Dipo harus dicopot," lanjutnya.

Jika tidak ingin terkesan arogan karena mencopot mantan aktivis mahasiswa 1974 itu, Presiden Yudhoyono bisa meminta orang terdekatnya agar meminta Dipo mundur secara baik-baik. Selanjutnya, Dipo diberikan jabatan lain.

Tjipta menambahkan, dirinya mengemukakan pendapat Dipo Alam. Menurutnya, di dalam era demokrasi dan kebebasan informasi seperti sekarang ini, semua orang bebas mengekspresikan pendapat termasuk mengkritik pejabat. "Yang tidak boleh adalah menghantam pribadi Presiden," paparnya.

**“** Kalau menginstruksikan boikot media massa, habis pemerintah SBY. ”

**Tjipta Lesmana**  
Pakar komunikasi politik

**Bola di tangan Presiden**

Hingga tenggat somasi dari Media Group, kemarin, Dipo Alam tidak mencabut ucapannya terkait ancaman memboikot iklan dan pemberitaan di media massa. Karena itu, pihak Media Group yang diwakili advokat senior OC Kaligis mengadakan pertemuan Dipo Alam ke Mabes Polri.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sujito sependapat dengan Tjipta Lesmana. Menurutnya, Presiden tidak bisa tinggal diam dengan seruan boikot informasi kepada media massa yang telah dikeluarkan Dipo. Arie mengatakan, harus ada evaluasi terhadap pejabat negara yang telah mengganggu kebebasan pers. "Proses hukum telah ditempuh. Kini bualan ada di tangan Presiden," terangnya.

Arie menerangkan, posisi media massa sama di dalam hukum. Media massa bukan institusi yang lepas kritik. Namun, jika pejabat yang mengeluarkan instruksi untuk boikot, itu dari mana cara berpikirnya? "Pejabat publik itu harus berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Seruan boikot media massa dari pejabat politik mengingatkannya memiliki otoritas bicara sesuai mandat undang-undang," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kemarin menjelaskan pihaknya tidak setuju pemboikotan media massa.

"Kalau boikot yang dimaksud itu, saya tidak setuju. Tapi pers juga harus *fair* dalam pemberitaan, jangan hanya menjelek-jelekan pemerintah. Hubungan antara pers dan pemerintah harus sinergis. Keduanya saling membutuhkan sehingga perlu dibangun relasi yang konstruktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," tukas Menthut. (Alw/P-3)

irvan@mediaindonesia.com

## Boikot Iklan Media Perburuk Citra SBY

TINDAKAN Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menginstruksikan seluruh sekjen dan humas kementerian untuk memboikot iklan media nasional yang mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berlebihan. Tindakan itu justru memperburuk citra pemerintahan SBY.

Pakar komunikasi politik UI Ade Armando mengungkap-

Menurutnya, ketiga media itu yakni *Metro TV*, *TV One*, dan *Media Indonesia*. Ketiga media itu bukan mengkritik pemerintah, melainkan menjelek-jelekan untuk meningkatkan kebencian publik terhadap pemerintah.

"*Metro TV* dan *TV One*. Saya lihat itu waktu saya di Kupang. (Media) cetaknya sesuai dengan yang punya TV juga (*Media Indonesia*), ha ha ha ha," ujar Dipo

Alam di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyanggah sikap Dipo. "Terlalu ber-

lebih, sangat menyedihkan."

Jika lontaran Dipo merupakan instruksi resmi pemerintah, Mahfud berjanji akan memerintahkan Sekjen MK untuk menolaknya karena perintah itu tidak sejalan dengan UUD 1945.

Setali tiga uang, Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengaku tak habis pikir dengan mantan aktivis 1978 itu. "Dulu dia pernah masuk penjara karena menuntun hak pers yang mengkritik pemerintahan Soeharto. Tapi, kok sekarang dia begitu?" sambung mantan Ketua MA itu. (AW/Nav/AO/\* /X-6)

Berita terkait hlm 2

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com) atau [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)